

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Waluyo, B., 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Efendi, A'An, Dyah Ochtorina Susanti, Rahmadi Indra Tektona, 2019, *Penelitian Hukum Doktrinal*, LaksBang Justitia, Yogyakarta.
- Campbell, H., 1990, *Black's Law Dictionary*, 6th Edition., W ST. Paul, Minnesota.
- Erawati, A F., dan Badudu, J.S, 2011, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Fuady M., 2012, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hermansyah, 2009, *Pokok – Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Lubis, Andi Fahmi, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, ROV Creative Media, Jakarta.
- Marzuki, P. M, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana-Prenada Media Group, Jakarta.
- Fuadi, Munir, 2014, *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over, & LBO*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nazir, Moh, 2009, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nugroho, Adi Susanti, 2014. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Prenada Media, Jakarta.
- Rokan, M.F., 2009, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta Utara.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Stroux, S., 2002, *Economics of Oligopoly: An Introduction for Lawyers*, European University Institute, Italy.
- Whish, R.and Bailey, D., 2015, *Competition law*, Oxford University Press, USA.

B. Jurnal

Setiadi, Wicipto, "Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 6, No. 4, Desember 2009.

Susanto, Sri Nur Hari, "Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi", Administrative Law & Governance Journal, Vol. 2, Isu 1, Maret 2019.

Prasetyanto, Panji Kusuma, "Pengaruh Produk Domestik Bruto dan Inflasi Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2002-2009", Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga, Vol. 1, No. 1, 2016.

Wijayanta, Tata, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2, 2014.

C. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Nomor 33 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara No. 3817).

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Nomor 27 Tahun 106, Tambahan Lembaran Negara No. 4756).

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan yang diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5234).

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Nomor 89 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5144).

D. Putusan

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10/KPPU-M/2021 tentang dugaan keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Kusumasentral Kencana oleh PT Inter Sarana Prabawa.

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-M/2021 tentang Dugaan Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Perindustrian Sawit Synergi Dan PT Bumi Makmur Sejahtera Jaya Oleh KI - Kepong Plantation Holdings Sdn. Bhd.

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 17/KPPU-M/2020 tentang Dugaan Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral dan PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk.

Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-M/2019 tentang keterlambatan pengambilalihan saham PT Indo Putra Khatulistiwa oleh PT Matahari Pontianak Indah

Putusan KPPU Nomor 01/KPPU-M/2019 tentang keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Buana Minerva Harvest oleh PT Citra Prima Sejati.

E. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Adeline Laureen Turangan, 2020, *Analisis Yuridis Dampak Akuisisi Uber oleh Grab di Negara-Negara Anggota ASEAN Terhadap Persaingan Usaha di Bidang Transportasi-Online*, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

F. Artikel Internet

IDN Financials, *PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG)*, <https://www.idnfinancials.com/id/srtg/pt-saratoga-investama-sedaya-tbk>, diakses pada 2 Februari 2022.

Saratoga – Investama, *Our History*, <https://saratoga-investama.com/our-company/>, diakses pada 2 Februari 2022.

G. Lain - lain

KPPU, 2020, Pedoman Penilaian terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan, KPPU, Jakarta.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2020 tentang Relaksasi Penegakan Hukum Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan Dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, Atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengenaan Denda Keterlambatan Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Sutan Remy Sjahdeini, “Aspek Hukum Merger, Konsolidasi, dan Auisisi dalam Upaya Penyehatan Perusahaan”, Makalah, Seminar tentang Aspek Hukum Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Dalam era Globalisasi, Diselenggarakan oleh Badan Hukum Pembinaan Nasional Departemen Kehakiman RI. Jakarta. Tgl. 10-11 Sepetember 1997.